

Menata Ulang Peta Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam Dalam Merespons Krisis Pangan Global (Perspektif Manajemen Komunikasi)

**Taufik R. Talalu¹, Wardoyo Dingkol², Syahrir Soleman³,
Aminulhaqim R. Talalu⁴, Sy. Aslamiah⁵, Arlin La Ili⁶, Abdul Ziad Arapa⁷**

^{1, 2, 4}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

^{3, 5}Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

⁶Universitas Muhammadiyah Luwuk, Banggai, Indonesia

⁷Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The global food crisis constitutes a multidimensional challenge that affects social, economic, and political stability, including in Indonesia. This condition necessitates the involvement of multiple actors, including student organizations, to respond strategically to the issue. This article aims to examine the reconfiguration of the movement map of Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) in responding to the global food crisis from a communication management perspective. The study is based on a literature review encompassing books, academic journal articles, reports from international and national institutions, and other relevant documents. The analysis focuses on identifying patterns of information management, issue framing, policy advocacy, and coordination with stakeholders. The findings indicate that communication management plays a strategic role in shaping public understanding, formulating contextual messages, strengthening organizational positioning in public and policy arenas, and fostering cross-sectoral collaboration. This article argues that strengthening communication management can serve as a critical foundation for HMI in restructuring a more planned and impactful movement strategy in addressing the global food crisis.

Keywords: *global food crisis, Himpunan Mahasiswa Islam, communication management*

Korespondensi: Taufik R. Talalu, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo 96119.
Email: ttalalu@iaingorontalo.ac.id

PENDAHULUAN

Persoalan ketahanan pangan telah menjadi salah satu isu yang paling mendesak di dunia saat ini. Data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Food and Agriculture Organization / FAO*) menunjukkan bahwa lebih dari 733 juta orang di dunia mengalami kelaparan kronis, sementara produksi pangan dunia menghadapi ancaman dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan konflik geopolitik. Lebih dari setengah produksi pangan global berada di wilayah yang mengalami kekeringan atau bencana iklim ekstrem, yang secara langsung menurunkan produktivitas pertanian dan memperburuk ketahanan pangan global (Kompas, 2024).

Selain itu, laporan *Global Report on Food Crises* menunjukkan bahwa pada 2023 hampir 282 juta orang di 59 negara mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang memerlukan respon segera (Kompas, 2024). FAO juga melaporkan bahwa pada 2024 lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah, terutama di wilayah Asia dan Afrika, yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap sistem pangan dunia semakin meningkat (JPNN, 2025).

Fenomena ini berdampak pada aspek produksi dan distribusi pangan, sekaligus pada dinamika sosial dan politik global. Harga pangan dunia pun mencatat kenaikan signifikan, yang tercermin dari indeks harga pangan FAO yang sempat mencapai rekor tertinggi dalam 19 bulan terakhir, dipicu oleh tekanan *supply chain* dan cuaca ekstrem (Reuters, 2024).

Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari gejolak ini meskipun tetap berada dalam kondisi stok pangan yang relatif aman. Beberapa tantangan nyata yang dihadapi adalah fluktuasi harga beras, ketergantungan pada impor komoditas tertentu, serta dampak perubahan iklim pada produktivitas pertanian. Tantangan tersebut menuntut pendekatan lintas sektor, termasuk peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam penyadaran publik dan advokasi kebijakan ketahanan pangan (JPNN, 2025).

Menghadapi tantangan tersebut, peran organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi penting, sebab mampu memfasilitasi dialog publik, penyebaran informasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. HMI merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 5 Februari 1947, berakar dari tradisi pemikiran Islam dan nasionalisme mahasiswa untuk berkontribusi terhadap masa depan bangsa (Kompas, 2022).

Sejarah panjang HMI menunjukkan peran organisasi ini bukan hanya sebagai wadah kaderisasi, melainkan juga sebagai kekuatan intelektual dan sosial-politik dalam berbagai periode penting Indonesia, seperti periode pasca kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi. Aktivitas HMI mencakup mobilisasi massa, pengembangan diskursus pemikiran Islam, serta peran dalam dinamika politik nasional (Website HMI, n.d.).

Namun, memasuki era global saat ini, tantangan yang dihadapi HMI semakin kompleks. Fenomena *global food crisis* merupakan tantangan baru yang bukan hanya soal ketersediaan pangan semata, melainkan juga soal bagaimana isu ini dikomunikasikan, dipahami publik, dan respons kebijakan dirumuskan oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks manajemen komunikasi, tantangan ini dapat melibatkan beberapa masalah, diantaranya: (1) Pengelolaan Informasi, yakni bagaimana isu krisis pangan dikonstruksi dan disebarluaskan kepada publik, termasuk klarifikasi data dan mitigasi misinformasi; (2) Advokasi Kebijakan, tentang bagaimana organisasi seperti HMI memposisikan suara mereka di ruang publik dan pembuat kebijakan untuk mendorong tindakan strategis dalam ketahanan pangan; (3) Koordinasi Gerakan, yakni bagaimana HMI membangun *stakeholder engagement* dengan aktor lain (pemerintah, LSM, perguruan tinggi) untuk memperluas dampak sosial dari kampanye dan programnya.

Pendekatan manajemen komunikasi menjadi penting karena perubahan global memerlukan respons yang melibatkan strategi pengelolaan informasi, serta hubungan dengan pihak lain. Penataan ulang peta gerakan HMI dalam menghadapi krisis pangan global harus melihat pergerakan organisasi ini sebagai gerakan komunikasi strategis yang diharapkan bisa membangun narasi, jejaring, dan advokasi kebijakan secara efektif.

METODOLOGI

Metode studi literatur (*literature review*) dipilih karena fokus artikel ini tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan atau pengujian hipotesis, melainkan pada penelusuran, pemetaan, dan sintesis temuan-temuan akademik terdahulu yang sejalan dengan isu krisis pangan global dan kontribusi manajemen komunikasi dalam gerakan organisasi mahasiswa, khususnya HMI. Sumber rujukan dalam artikel ini mencakup berbagai bentuk informasi tertulis yang dapat ditelusuri secara akademik, antara lain artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional dan nasional terkait krisis pangan dan ketahanan pangan, berita, serta publikasi yang membahas dinamika

gerakan HMI. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penulis atau lembaga, serta kesesuaian dengan konteks pembahasan.

Pengumpulan bahan kajian dilakukan melalui penelusuran terhadap jurnal dan sumber lainnya. Literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus artikel ini, yaitu pengelolaan informasi, advokasi kebijakan, dan koordinasi gerakan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan-temuan dari berbagai sumber dibandingkan, dipetakan, dan ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus artikel ini. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan implikasi konseptual serta arah rekomendatif bagi penataan ulang peta gerakan HMI dari perspektif manajemen komunikasi. Melalui pendekatan ini, setiap argumen yang dikemukakan dalam tulisan ini diupayakan memiliki dasar akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Informasi Krisis Pangan dalam Perspektif Manajemen Komunikasi

Krisis pangan global dalam perspektif manajemen komunikasi merupakan persoalan ketersediaan bahan pangan yang berkaitan erat dengan persoalan bagaimana informasi tentang krisis tersebut dikelola, diproduksi, dan disirkulasikan di ruang publik. Literatur komunikasi krisis menegaskan bahwa kegagalan organisasi dalam mengelola informasi pada situasi krisis sering kali memperburuk dampak sosial krisis itu sendiri (Coombs, 2012).

Isu krisis pangan secara global dikonstruksi melalui laporan-laporan lembaga internasional yang memiliki otoritas data. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, dan WHO dalam laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* (SOFI) secara konsisten menunjukkan bahwa ketidakamanan pangan meningkat sejak pandemi COVID-19, diperparah oleh konflik geopolitik dan perubahan iklim. Laporan SOFI 2023 mencatat bahwa lebih dari 735 juta orang di dunia mengalami kelaparan, dengan tren yang belum menunjukkan pemulihan signifikan (FAO et al., 2025). Data ini menjadi dasar narasi krisis pangan global di media internasional.

Namun, dalam konteks nasional Indonesia, informasi global tersebut tidak selalu terhubung secara langsung dengan pengalaman keseharian publik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan spesifik berupa fluktuasi harga pangan, ketimpangan distribusi antarwilayah, serta kerentanan rumah

tangga miskin terhadap kenaikan harga beras dan bahan pokok lainnya (Badan Pangan Nasional, 2024; Badan Pusat Statistik, 2025b, 2025c, 2025a). Di sinilah persoalan manajemen komunikasi muncul, data tersedia, tetapi belum sepenuhnya dikelola menjadi pesan yang kontekstual dan mudah dipahami publik.

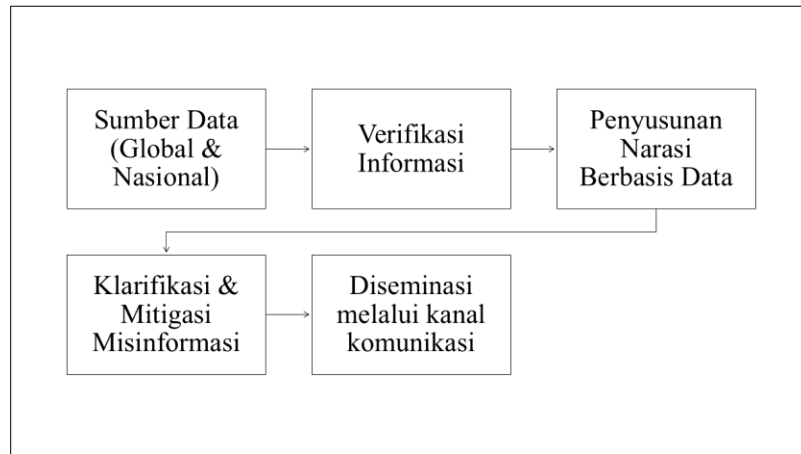
Pengelolaan informasi dalam kajian manajemen komunikasi organisasi, mencakup tiga aspek yaitu, akurasi data, kejelasan pesan, dan konsistensi narasi (Cornelissen, 2023). Ketika isu krisis pangan beredar di ruang publik tanpa pengelolaan yang sistematis, muncul risiko misinformasi dan disinformasi, terutama di media sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa narasi krisis pangan di media digital sering kali bersifat sensasional, memicu kepanikan, atau justru menimbulkan sikap apatis karena dianggap terlalu jauh dari realitas (Vosoughi et al., 2018).

Organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam konteks ini memiliki posisi strategis sebagai *intermediary actor* dalam ekosistem komunikasi publik. Literatur tentang peran organisasi masyarakat sipil menegaskan bahwa aktor non-negara dapat berfungsi sebagai penyaring informasi (*information broker*) yang menjembatani data teknokratis dengan pemahaman publik (Castells, 2013). Namun, peran ini hanya efektif jika organisasi memiliki kerangka manajemen komunikasi yang jelas.

Telaah terhadap dokumen-dokumen internal HMI, tulisan reflektif kader, serta kajian tentang gerakan mahasiswa menunjukkan bahwa selama ini HMI lebih dikenal melalui isu-isu politik, keislaman, dan kebangsaan, sementara isu ketahanan pangan belum menjadi agenda komunikasi utama yang dikelola secara sistematis (Azra, 1999; Majid, 2008; Munawar-Rachman, 2022). Akibatnya, ketika krisis pangan global mengemuka, belum terlihat pola pengelolaan informasi yang terstruktur, baik dalam bentuk klarifikasi data, edukasi publik, maupun narasi alternatif yang berbasis pada konteks nasional.

Berdasarkan sudut pandang manajemen komunikasi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi dan kemampuan organisasi dalam mengelolanya. Padahal, literatur komunikasi strategis menekankan bahwa organisasi yang mampu bertahan di tengah krisis adalah organisasi yang memiliki *information governance*, yakni kemampuan menentukan informasi apa yang disampaikan, kepada siapa, melalui saluran apa, dan dengan tujuan apa (Falkheimer & Heide, 2018). Dengan demikian, pengelolaan informasi krisis pangan seharusnya menjadi fondasi awal dalam penataan ulang peta gerakan HMI. Tanpa pengelolaan

informasi yang berbasis data valid, terverifikasi, dan dikomunikasikan secara strategis, gerakan yang dilakukan HMI berisiko kehilangan legitimasi akademik maupun kepercayaan publik.



Sumber: Olahan Penulis (2025)

Gambar 1. Skema Pengelolaan Informasi Krisis Pangan dalam Perspektif Manajemen Komunikasi

Gambar 1 menunjukkan skema pengelolaan informasi krisis pangan dalam perspektif manajemen komunikasi yang menempatkan organisasi seperti HMI sebagai penghubung antara sumber data dan publik. Alur komunikasi dimulai dari pemanfaatan sumber data global dan nasional yang kemudian melalui tahap verifikasi untuk memastikan akurasi informasi. Informasi yang telah tervalidasi selanjutnya diolah menjadi narasi berbasis data agar mudah dipahami dan relevan dengan konteks publik. Tahap diseminasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Proses ini dilengkapi dengan mekanisme klarifikasi dan mitigasi misinformasi sebagai respons terhadap dinamika arus informasi di ruang publik.

2. Posisi dan Strategi Komunikasi Advokasi HMI dalam Mendorong Kebijakan Ketahanan Pangan

Advokasi kebijakan dalam sudut pandang manajemen komunikasi, dapat dipahami sebagai proses strategis untuk membangun, menyampaikan, dan mempertahankan posisi organisasi di ruang publik dan arena pengambilan keputusan. Advokasi kebijakan berfokus pada pengaruh terhadap aktor-aktor tertentu, khususnya para pembuat kebijakan (Hallahan et al., 2007).

Literatur komunikasi menegaskan bahwa efektivitas advokasi selain ditentukan oleh kekuatan isu, kejelasan posisi organisasi dan konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik dan negara juga menjadi penentu (Davis, 2023). Dalam konteks krisis pangan global, posisi advokasi yang kabur atau reaktif berisiko membuat organisasi kehilangan daya tawar dalam diskursus kebijakan.

Isu ketahanan pangan sendiri telah menjadi agenda strategis di tingkat global dan nasional. Laporan FAO menempatkan *food security* sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya SDG 2: *Zero Hunger* (FAO et al., 2025). Ketahanan pangan di Indonesia secara eksplisit menjadi bagian dari kebijakan nasional, sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan dan regulasi pangan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023). Namun, studi terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dalam isu pangan masih sering bersifat sporadis dan belum terlembaga secara kuat (McGee & Gaventa, 2011).

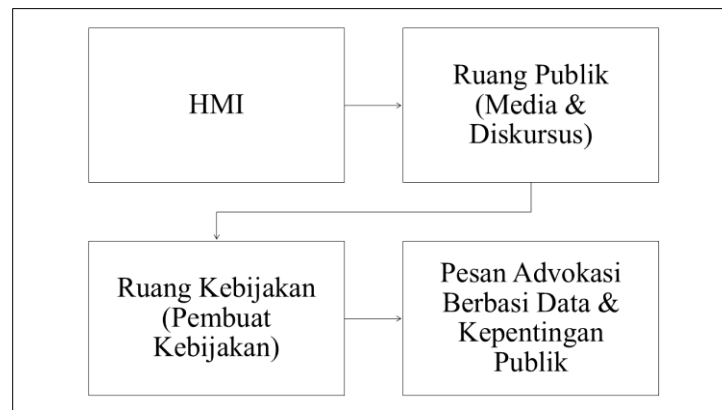
Posisi advokasi HMI terhadap isu krisis pangan dalam perspektif manajemen komunikasi, perlu dibangun melalui sikap yang berbasis data dan nilai. Komunikasi strategis menuntut organisasi untuk secara sadar menentukan *who we are*, *what we stand for*, dan *what change we seek* (Hallahan et al., 2007). Dalam hal ini, HMI dapat memposisikan diri sebagai aktor intelektual dan moral yang mendorong kebijakan ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang temporer.

Advokasi menuntut pemilihan saluran dan gaya komunikasi yang berbeda antara ruang publik dan ruang kebijakan. Studi tentang *policy advocacy communication* menunjukkan bahwa pesan untuk publik luas cenderung bersifat normatif dan persuasif, sementara pesan kepada pembuat kebijakan harus dirumuskan secara rasional, berbasis bukti, dan selaras dengan kerangka regulasi yang ada. Dalam konteks ini, pernyataan sikap, kajian kebijakan (*policy brief*), dan forum diskusi menjadi instrumen komunikasi yang relevan bagi organisasi seperti HMI.

Namun, kajian tentang gerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan bahwa advokasi kebijakan sering kali berhenti pada ekspresi simbolik saja, seperti pernyataan sikap atau aksi massa, tanpa diikuti oleh strategi komunikasi lanjutan yang berorientasi pada proses kebijakan (Aspinall, 2005). Dari sudut pandang manajemen komunikasi, pola ini mencerminkan lemahnya

integrasi antara pesan publik dan pesan kebijakan. Akibatnya, suara gerakan cenderung terdengar di media, tetapi kurang berdampak pada perubahan kebijakan.

Oleh karena itu, penataan ulang peta gerakan HMI dalam menghadapi krisis pangan global mensyaratkan penguatan komunikasi advokasi yang terencana. Literatur komunikasi organisasi menekankan pentingnya *message alignment*, yakni kesesuaian antara narasi publik, dokumen kebijakan, dan tindakan organisasi (Cornelissen, 2023). Dalam isu ketahanan pangan, *alignment* ini dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap pesan advokasi HMI, baik di ruang publik maupun dalam dialog kebijakan, selalu merujuk pada data yang sama, tujuan yang jelas, dan posisi yang konsisten.



Sumber: Olahan Penulis (2025)

Gambar 2. Kerangka Advokasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Manajemen Komunikasi

Gambar 2 memperlihatkan kerangka advokasi kebijakan ketahanan pangan dalam perspektif manajemen komunikasi yang menempatkan HMI sebagai aktor penghubung antara ruang publik dan ruang kebijakan. Posisi HMI ditunjukkan melalui arus komunikasi dua arah yang mengalir dari dan menuju ruang publik, termasuk media dan diskursus sosial, serta ruang kebijakan yang melibatkan para pembuat kebijakan. Pesan advokasi yang dikomunikasikan berlandaskan data dan kepentingan publik memungkinkan terjadinya penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan proses perumusan kebijakan. Skema ini menegaskan bahwa efektivitas advokasi bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola komunikasi secara konsisten, argumentatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Pola Komunikasi dan Koordinasi HMI dengan Pemangku Kepentingan dalam Isu Krisis Pangan Global

Koordinasi dengan pemangku kepentingan, dalam kajian manajemen komunikasi kontemporer, dipahami sebagai bagian dari *strategic stakeholder engagement*, yakni proses komunikasi yang dirancang secara sadar untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks (*wicked problems*), termasuk krisis pangan global (Bryson et al., 2015; Cornelissen, 2023).

Krisis pangan global berkaitan juga dengan persoalan tata kelola, distribusi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial. Laporan FAO menegaskan bahwa persoalan ini menuntut pendekatan kolaboratif lintas sektor, karena tidak ada satu sektor pun yang mampu meresponsnya secara mandiri (FAO et al., 2025). Dalam konteks ini, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa memiliki peran penting sebagai penghubung antara negara, masyarakat, dan perguruan tinggi.

Koordinasi gerakan HMI dengan pemerintah, dari sudut pandang manajemen komunikasi, perlu dibangun melalui pola komunikasi yang terstruktur, berbasis program, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Studi terdahulu menunjukkan bahwa aktor non-negara yang mampu menyelaraskan bahasa komunikasinya dengan kerangka kebijakan publik cenderung lebih diterima sebagai mitra strategis dalam proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008; Bryson et al., 2015). Dalam isu ketahanan pangan, hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan HMI dalam forum konsultatif, program pendampingan masyarakat, serta penyampaian rekomendasi berbasis kajian akademik.

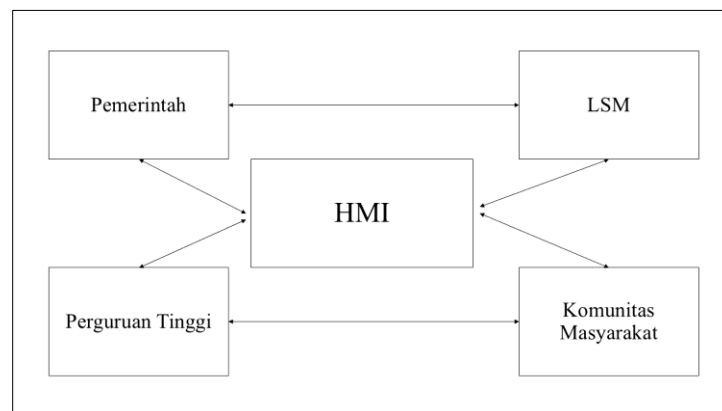
Koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menuntut pola komunikasi yang bersifat horizontal dan berbasis jejaring. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas gerakan sosial modern sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi membangun jaringan kolaboratif yang fleksibel dan saling berbagi sumber daya informasi (Keck & Sikkink, 1998; Porta & Diani, 2006). Dalam konteks krisis pangan, kerja sama dengan LSM memungkinkan HMI memperluas jangkauan edukasi publik, penguatan kapasitas komunitas, serta implementasi program pangan yang berbasis masyarakat.

Sementara itu, koordinasi dengan perguruan tinggi memiliki dimensi strategis dalam penguatan basis pengetahuan. Literatur terdahulu menekankan bahwa perguruan tinggi berperan sebagai produsen data, riset, dan inovasi yang dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas

intervensi sosial (Brundiars & Wiek, 2017; Etzkowitz & Zhou, 2017) Ditinjau dari perspektif manajemen komunikasi, relasi HMI dengan kampus dapat diformalkan melalui riset kolaboratif, diskusi kebijakan, dan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada ketahanan pangan.

Namun demikian, berbagai kajian tentang gerakan kemahasiswaan di Indonesia menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor ini sering kali bersifat sporadis dan tidak dilembagakan secara berkelanjutan (Antlöv et al., 2010; Aspinall, 2005). Kondisi ini mengindikasikan lemahnya perencanaan komunikasi jangka panjang dalam membangun relasi dengan pemangku kepentingan.

Itulah sebabnya, penataan ulang peta gerakan HMI dalam menghadapi krisis pangan global memerlukan penguatan manajemen komunikasi yang terencana. Strategi ini mencakup pemetaan para aktor, penentuan tujuan kolaborasi, serta desain saluran komunikasi yang sesuai dengan karakter masing-masing pemangku kepentingan (Cornelissen, 2023). Dengan pendekatan semacam ini, HMI dapat bertransformasi dari aktor gerakan reaktif menjadi bagian dari jejaring kolaboratif yang berkontribusi nyata dalam agenda ketahanan pangan nasional, bahkan global.



Sumber: Olahan Penulis (2025)

Gambar 3. Kerangka Koordinasi dan Kolaborasi HMI dalam Isu Krisis Pangan Global

Gambar 3 menunjukkan kerangka koordinasi dan kolaborasi HMI dalam merespons isu krisis pangan global dengan menempatkan HMI sebagai simpul utama yang menghubungkan berbagai aktor strategis. Dalam kerangka ini, HMI berperan sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui hubungan timbal balik. Pola ini menunjukkan bahwa peran HMI tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai mediator yang mendorong pertukaran informasi, penguatan kapasitas, serta sinkronisasi agenda

advokasi. Dengan posisi tersebut, HMI berkontribusi dalam memastikan bahwa respons terhadap krisis pangan berjalan secara kolaboratif, partisipatif, dan terintegrasi lintas sektor.

SIMPULAN

Tulisan ini memposisikan krisis pangan global sebagai persoalan yang menuntut respons kebijakan, sosial, dan komunikasi secara terintegrasi. Telaah terhadap literatur, laporan, dan wacana kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas gerakan organisasi seperti HMI sangat berkaitan dengan pengelolaan komunikasi yang sistematis dan kontekstual.

Pengelolaan informasi mengenai krisis pangan berperan penting dalam membangun pemahaman publik dan mengurangi distorsi informasi. Penyampaian data yang kredibel serta mekanisme klarifikasi yang jelas membantu membentuk kesadaran bersama dan mendorong partisipasi sosial yang lebih terarah.

Posisi dan suara organisasi kemahasiswaan seperti HMI memperoleh makna melalui komunikasi yang konsisten dan argumentatif di ruang publik serta ruang kebijakan. Pendekatan tersebut membuka peluang kontribusi organisasi dalam mendorong agenda ketahanan pangan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pola komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan menentukan perluasan dampak sosial gerakan. Relasi yang dibangun dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi menciptakan ruang kolaborasi lintas sektor dalam merespons tantangan krisis pangan secara kontinu.

Manajemen komunikasi berfungsi sebagai elemen yang strategis dalam penataan ulang peta gerakan HMI menghadapi krisis pangan global. Penguatan aspek ini mendukung terbentuknya gerakan yang terencana, relevan dengan konteks kebangsaan, dan memiliki jangkauan sosial yang lebih luas.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil Society Capacity Building for Democratic Reform: Experience and Lessons from Indonesia. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 21(3), 417–439.

<https://doi.org/10.1007/s11266-010-9140-x>

- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Azra, A. (1999). *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Statistik Ketahanan Pangan 2023*. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Cerita Data Statistik untuk Indonesia - Membangun Generasi Emas Melalui Kecukupan Konsumsi Pangan* (Vol. 2, Issue 2). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024. Nilai dan Biaya Produksi Beberapa Komoditas Utama pada Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025c). *Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Brundiers, K., & Wiek, A. (2017). Beyond Interpersonal Competence: Teaching and Learning Professional Skills in Sustainability. *Education Sciences*, 7(1).
<https://doi.org/10.3390/educsci7010039>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *The American Society for Public Administration*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>Digital Object Identifier (DOI)
- Castells, M. (2013). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Coombs, W. T. (2012). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cornelissen, J. (2023). *Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice* (7th ed.). SAGE Publications.
- Davis, A. (2023). *Political Communication: An Introduction for Crisis Times* (2nd ed.). Polity.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). *The Triple Helix University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship* (2nd ed.). Routledge.
- Falkheimer, J., & Heide, M. (2018). *Strategic Communication An Introduction* (1st ed.). Routledge.
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing High Food Price Inflation for Food Security and Nutrition*.
<https://doi.org/10.4060/cd6008en>
- Hallahan, K., Holtzhausen, D. R., Ruler, B. van, Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining Strategic Communication. *International Journal of Strategic Communication*, 1(1), 3–35.
<https://doi.org/10.1080/15531180701285244>
- JPNN. (2025). *Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?*

- <https://www.jpnn.com/news/krisis-pangan-global-mulai-terjadi-bagaimana-status-indonesia>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Kompas. (2022). *Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)*.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/05/130000379/sejarah-himpunan-mahasiswa-islam-hmi>
- Kompas. (2024). *Krisis Iklim Mengancam Ketahanan Pangan*.
<https://www.kompas.id/artikel/krisis-iklim-mengancam-ketahanan-pangan>
- Majid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- McGee, R., & Gaventa, J. (2011). Shifting Power? Assessing the Impact of Transparency and Accountability Initiatives. *Institute of Development Studies*, 2011(383), 1–39.
https://doi.org/10.1111/j.2040-0209.2011.00383_2.x
- Munawar-Rachman, B. (2022). *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (M. T. Rahman & M. Z. Haq (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Porta, D. della, & Diani, M. (2006). *Social Movements: An Introduction* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
- Reuters. (2024). *World food prices reach 19-month high in November, UN says*.
<https://www.reuters.com/world/world-food-prices-reach-19-month-high-november-un-says-2024-12-06>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
- Website HMI. (n.d.). *Apa itu HMI?* <https://himpunanmahasiswaislam.web.id/>